

POLITIK

Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan

JURNAL ENAM BULANAN | VOL. 7 No. 13. 2011

Partisipasi, Kebijakan Dan Dinamika Politik

**Partisipasi Politik Masyarakat
Kabupaten Aceh Pidie Pada Pemilu pada Tahun 2012**
Effendi Hasan

Pendatang Tanpa Izin Dan Pilihanraya Di Sabah
Ramli Dollah dan Wan Shawaluddin Wan Hassan

**Wanita Brunei Dalam Spektrum Politik Sabah:
Satu Penelusuran Sejarah**
Zaini Othman dan Saat Awang Damit

**Kebijakan Fiskal Pada Bingkai Desentralisasi Asimetris Dalam
Pembangunan Daerah Di Provinsi Papua 2001-2007**
Cucu Suryaman

**Kebijakan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Pada 2008 - 2010**
Sri Lestari

**Kewenangan Pengelolaan Hutan Dalam Implementasi Desentralisasi
(Dalam Rangka Kebijakan Perlindungan Hutan)**
Kausar AS

**Resolusi Konflik Di Kabupaten Bener Meriah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Pemberlakuan
Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki Pada Tahun 2009**
Agus Setiawan

Perang, Pendidikan Dan Perdamaian Di Aceh
Saifuddin Yunus dan Kamaruddin M. Said

ISSN 1978-063X



9 771978 63045

Daftar Isi

| No | | Hal |
|------|---|------|
| I. | Kata Pengantar | iii |
| II. | Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Pidie Pada PemiluEffendi Hasan | 961 |
| III. | Pendatang Tanpa Izin dan Pilihanraya Di SabahRamli Dollah dan Wan Shawaluddin Wan Hassan | 971 |
| IV | Wanita Brunei Dalam Spektrum Politik Sabah: Satu Penelusuran SejarahZaini Othman dan Saat Awang Damit | 985 |
| V | Kebijakan Fiskal Pada Bingkai Desentralisasi Asimetris Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Papua 2001 – 2007Cucu Suryaman | 999 |
| VI | Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada 2008 – 2010Sri Lestari | 1029 |
| VI | Kewenangan Pengelolaan Hutan Dalam Implementasi Desentralisasi (Dalam Rangka Kebijakan Perlindungan Hutan)Kausar AS | 1049 |
| VII | Resolusi Konflik di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Pemberlakuan MoU Helsinki Pada Tahun 2009Agus Setiawan | 1071 |
| VIII | Perang, Pendidikan dan Perdamaian di AcehSaifuddin Yunus dan Kamaruddin M. Said | 1079 |

Perang, Pendidikan Dan Perdamaian Di Aceh

Saifuddin Yunus* dan Kamaruddin M. Said**

Abstract

This study discusses the war, education and peace in Aceh. The main issue in this study is on how social interactions and secondary socialization processes in educational institutions in the community who experience a change after the war in Aceh. The war in Aceh has sued the stability of social institutions, one of which institutions are exposed to the negative impact of the war. One of the negative impact of the war is on social interaction between students with students, students with teachers in the era of the early years of war and peace. When the situation in Aceh has been conducive conditions began to change social interaction. This study was undertaken to find out and identified the social interaction in educational institutions the war era and the era of peace and development has been achieved in the education sector in the post-war tamatnya East Aceh, Aceh Province, Indonesia. The war between the Free Aceh Movement (GAM) with the Indonesian government ended after both sides agreed to a peace agreement signed in Helsinki Finland.

Keywords : war, socialization, interaction and peace

A. Pendahuluan

Isu utama dalam kajian ini adalah tentang bagaimana proses sosialisasi sekunder menembus lembaga pendidikan formal dan interaksi sosial yang

berlangsung suatu lingkungan masyarakat yang mengalami perubahan setelah zaman perang yang berlangsung sejak 1976 – 2005 di Aceh, yang berakibat, ada sebagian pelajar hidup tanpa bimbingan

* Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dan Pelajar Ph.D pada Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Email: saifuddin_my@yahoo.com.

**Profesor pada Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Email: kamaruddinsaid1988@gmail.com

dan lindungan dari kedua orang tuanya. Perang yang terjadi di Aceh telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap lembaga pendidikan. Misalnya di Aceh Timur, sekolah terpaksa ditutup selama beberapa bulan, proses belajar-mengajar dihentikan, tetapi, kendati tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik, para siswa terpaksa diluluskan ketika mereka menjalani ujian akhir. Ini adalah sekelumit dari sejarah kelam dunia pendidikan ketika Aceh masih dalam keadaan perang. Namun ketika Aceh telah memasuki zaman damai, adakah interaksi sosial dalam lembaga pendidikan di Aceh mengalami perubahan ?

Penelitian tentang pendidikan di negara perang telah banyak dilakukan, di antaranya adalah Nelles (2005) yang mengkaji pendidikan, perang dan keamanan di Kosovo, suatu negara yang mengalami penderitaan panjang akibat konflik antar etnis; Albania dan Serbia. Pemerintahan Milosevic melakukan *ethnic cleansing* terhadap etnis Albania, pada rentang 1990 hingga 1997, orang Serbia telah menembak 18.000 guru Albania, sehingga 400.000 murid pun terpaksa putus sekolah. Hal ini terjadi setelah Pengadilan Serbia pada 1989 telah menjatuhkan vonis terhadap 379 guru Albania, dengan hukuman tidak boleh mengajar etnik Serbia-Kroasia. Saat itu lebih dari 7000 ditangkap, sedang ribuan siswa mendapatkan teror yang teramat menakutkan. Bahkan, pada rentang 1991, ribuan dosen Albania dan mahasiswa diusir dari Pristina University. Akibatnya, baik di sekolah maupun di masyarakat, semua anak-anak

Albania yang masih usia belajar menaruh dendam terhadap orang Serbia.

Pada rentang 2000, Forum Pendidikan Dunia di Dakar, melaporkan betapa konflik yang terjadi di Kosovo telah menyebabkan 45% bangunan sekolah rusak atau hancur; 668 bangunan sekolah perlu perbaikan sederhana, sedang 135 bangunan sekolah lainnya harus dibangun kembali. Kesehatan anak-anak pun menurun drastis akibat dari buruknya air bersih dan sanitasi. Bahkan, lebih dari setengah juta orang mengungsi sehingga perlu dibuat sistem sekolah bergiliran atau program pengajaran secara khusus. Nelles menarik suatu simpulan, selama terjadinya perang di Kosovo, pemerintah telah gagal melakukan diplomasi sehingga berakibat pada terjadinya kemiskinan, ketertinggalan dalam pembangunan, kurangnya perhatian terhadap pendidikan serta pelanggaran hak asasi manusia. Setelah perang NATO-Kosovo berhenti, maka, pendidikan menjadi bagian yang terpenting dari upaya rekonstruksi pasca-konflik.

Tidak jauh berbeda dengan peperangan yang terjadi di Aceh dalam lima tahun terakhir (2000-2005) --- 500 sekolah terbakar, lebih dari 50 orang guru dibunuh, dan sekitar 514 orang guru meninggalkan Aceh dengan alasan keamanan --- lebih dari 5 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dibunuh (Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003). Bahkan, 2 Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ar-Raniry) dan Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) ditem-

bak.

Sedang penelitian lain yang mengkaji pendidikan dan perang adalah Kreso (2008) --- tentang akibat dan pasca perang terhadap sistem pendidikan di Bosnia dan Herzegovina. Kreso menyatakan, seperti negara-negara Eropa Timur lainnya, Bosnia dan Herzegovina telah menghadapi masa transisi singkat dari sistem sosialis ke kapitalisme yang sempat terputus akibat perang yang berlangsung selama empat tahun. Kreso menambahkan, termasuk pendidikan, sistem sosial dan infrastruktur yang ada di Bosnia dan Herzegovina pun rusak dan hancur akibat perang.

Dari sekian banyak akibat yang ditimbulkan oleh perang, yang paling membekas bahkan sampai sekarang masih dirasakan adalah dampak terhadap lembaga pendidikan --- perang yang berlangsung lebih dari 10 tahun telah menimbulkan ancaman yang serius bagi para pemuda di negara tersebut --- di antaranya adalah terjadinya diskriminasi pada kelompok-kelompok tertentu. Selama perang berlangsung, selain bendera Kroasia yang berkibar di mana-mana, kurikulum pun diubah, dan buku teks yang digunakan di Bosnia dan Herzegovina diimpor dari negara tetangga; Republik Croatia. Di dalam sistem pendidikan, cara-cara tersebut merupakan suatu kesalahan yang terbesar. Penyalahgunaan kurikulum tersebut adalah suatu kesalahan besar dalam sistem pendidikan. Pasca perang, sebuah sekolah tenda pun didirikan di Usora dekat kota Tesanj di pusat kota Bosnia dan Herzegovina --- para siswa

tahun pertama (1998/1999) yang hadir ada yang diwawancarai oleh sebuah stasiun TV --- mereka percaya dan mengatakan bahwa ibu kota tanah air mereka adalah Zagreb, ibu kota Kroasia, dan presiden mereka adalah Franjo Tudjman, Presiden Kroasia pada waktu itu.

Hal tersebut di atas merupakan konsekuensi logis yang harus diterima oleh seluruh rakyat karena menggunakan buku teks yang diimpor dari Kroasia, serta sebagai akibat dari keengganan dan ketidakmampuan para guru dalam memberikan informasi yang akurat tentang Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, pendidikan yang diselenggarakan oleh Tentara BiH, kebanyakan menggunakan kurikulum yang biasa dipakai sebelum perang --- walau beberapa inovasi tambahan telah diperkenalkan selama perang, tetapi, sistem pendidikan pada bagian ini tidak dapat menahan tekanan dari kepentingan nasionalistis. Sistem pendidikan di Bosnia berusaha untuk membangun patriotisme secara utuh meski nilai-nilai budaya dan agama Islam terasa masih sulit untuk diterima oleh yang lain. Contoh-contoh tersebut menunjukkan betapa ada suatu pengaruh yang kuat antara nasionalisme, kebijakan, dan kepentingan kelompok terhadap pendidikan, sehingga mengakibatkan munculnya tiga sistem pendidikan kebangsaan dan pemaksaan penggunaan satu bahasa di dalam sistem pendidikan; bahasa Bosnia, Kroasia atau Serbia.

Peneliti lain yang juga mengkaji bidang ini adalah Shemyakina (2011); pengaruh konflik bersenjata di Tajikistan

(1992-1998) yang dikaji secara regional dan temporal pada hasil sekolah. Hasil kajian menunjukkan, anak perempuan usia sekolah yang selama konflik dan bermukim di daerah yang terkena dampak konflik, maka, kecil kemungkinannya dapat menyelesaikan pendidikan usia wajib belajar mereka dibanding anak perempuan pada usia yang sama yang bermukim di daerah yang relatif tidak terpengaruh oleh konflik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konflik kekerasan memiliki pengaruh yang amat besar pada partisipasi perempuan.

Penelitian tentang dampak perang terhadap pendidikan juga pernah dilakukan oleh Stewart et al (2001); Ichino dan Winter-Ebmer (2004); Merrouche (2006); Akresh dan Walque de (2008). Bahkan, baru-baru ini, studi tentang dampak konflik bersenjata pada populasi dengan menggunakan metode empiris yang sama juga digunakan dalam kajian Shemyakina (Merrouche 2006; Akresh et al, 2009; Dube dan Vargas 2006; Bellows dan Miguel 2008; Akresh de dan Walque 2008).

Dari kajian terdahulu didapat empat akibat betapa perang dapat berpengaruh pada dunia pendidikan; Pertama, bagi wilayah yang terkena konflik, secara tak terduga sering mengurangi sumber keuangan yang tersedia untuk banyak rumah tangga sehingga berdampak terhadap pendapatan keluarga dan akhirnya amat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sekolah. Kedua, bagi anak-anak yang bangunan sekolahnya hancur selama perang harus belajar di

sekolah lain sehingga mengganggu pendidikan mereka. Ketiga, selama konflik berlangsung bahaya selalu mengintai siapa pun yang keluar rumah, karena pasukan bersenjata dan milisi sering meneror masyarakat sipil. Kadang, para militan juga menargetkan lembaga pendidikan sebagai objek penculikan dan intimidasi. Keempat, anak-anak mungkin putus sekolah karena orang tuanya meninggal.

Selain yang tersebut di atas, konflik bersenjata juga memiliki dampak gender tertentu, misalnya; untuk menghindari serangan seksual dan pelecehan dalam perjalanan mereka ke sekolah, maka, anak perempuan harus tinggal di rumah, sementara, anak lelaki berpartisipasi dalam konflik bersenjata sebagai sukarelawan. Hal ini amat terasa bahkan menjadi permasalahan yang cukup krusial di Uganda Utara --- pasar tenaga kerja kesulitan menampung anak-anak-korban penculikan akibat kurangnya pendidikan dan rendahnya produktivitas akibat selama bertahun-tahun mereka menghabiskan waktu dengan pasukan pemberontak.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa dampak dari konflik bersenjata sangat merugikan anak-anak, terutama dari kalangan keluarga miskin atau anak yatim yang bermukim di daerah yang terkena dampak konflik. Akresh et al (2009) menyatakan; setelah genosida di Rwanda, karena ada pemerataan pendidikan di semua kalangan, baik lelaki, perempuan, kaya dan miskin, maka, pendidikan bagi anak yatim tidak mengalami permasalahan. Stewart et al (2001)

berpendapat; akibat konflik bersenjata di beberapa negara Afrika, maka, partisipasi anak perempuan dalam pendidikan mengalami penurunan, sementara, di negara lain, partisipasi anak laki-laki mengalami penurunan sedang partisipasi perempuan meningkat.

Dari uraian di atas, ada tiga hal yang ingin dilihat dalam kajian ini; pertama bagaimana interaksi sosial antara pelajar dengan pelajar pada era perang dan damai di Aceh? Kedua bagaimana interaksi antara guru dengan pelajar pada era perang dan damai di Aceh? Ketiga bagaimana pembangunan sektor pendidikan pasca perang?

B. Landasan Konseptual

Perang adalah tindakan yang diambil oleh sebuah negara atas nama seluruh rakyat untuk mempertahankan kedaulatannya --- walau yang benar-benar berperang hanya angkatan bersenjata kedua belah pihak yang terlibat. Karena adanya kondisi itu, maka beberapa peneliti antar bangsa melihat perang sebagai satu kondisi yang mengizinkan dua atau lebih dari dua kelompok yang bermusuhan untuk menyelesaikan konflik mereka dengan menggunakan kekuatan militer. Inilah pandangan yang mencoba diketengahkan oleh Quincy Wright dalam bukunya; *A Study of War*. Ini berarti, suatu perang harus dimulai dengan satu deklarasi perang secara terbuka dan hanya berakhir jika ada deklarasi betapa perang tersebut sudah berakhir atau melalui perjanjian tertentu. Seperti halnya di Aceh, status Daerah Operasi Militer

(DOM) dan Darurat Sipil merupakan payung hukum untuk melegalkan perang di sana. Sementara, Perjanjian Damai Helsinki yang ditandatangani antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 --- merupakan perjanjian yang menyatakan bahwa perang telah berakhir untuk sementara waktu. Perang menurut Warjaya (1989:) biasanya terjadi sebagai hasil kegagalan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan permusuhan mereka dengan secara damai melalui meja perundingan.

Perang menurut Bahrum (1982) adalah suatu tindakan untuk mendapatkan keadilan. Perang bukanlah tujuan, tujuan perang adalah damai, perang juga merupakan lanjutan daripada propaganda diplomasi dan propaganda lainnya melalui cara konvensional. Sedangkan Linge (1993) menyebutkan; perang adalah salah satu alat politik. Oleh karena itu, perang harus digunakan untuk tujuan politik dan alat tersebut harus ditempatkan di bawah tujuan --- karena, kalau alat telah merusak tujuan, maka, alat tersebut (perang) sudah tidak berarti lagi. Oleh karena itu, perang tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai alat politik.

Beberapa sarjana telah menyimpulkan bahwa perang internal (*internal conflict*) berbeda dengan perang saudara. Robin (1972) menyebutkan perang saudara berdasarkan beberapa ciri; Pertama, merupakan perang terbuka yang memiliki gema antar bangsa. Kedua, diorganisasi oleh sebuah kelas yang kuat secara

sosial dengan tujuan untuk melindungi kesewenang-wenangan mereka. Ketiga, pemerintahan tandingan yang didirikan bukan hanya memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga memiliki dukungan yang memadai dari kelompok militer yang mampu memimpin rakyatnya untuk menghapus pemerintahan yang ada. Keempat, pemerintahan tandingan menguasai wilayah yang dekat dengan pemerintahan yang ada. Kelima, tindakan pemerintahan tandingan tersebut akan diatur oleh orang profesional, kalangan aristokrat dan para tokoh.

Menurut Al Chaidar (1998), sesungguhnya, apa yang terjadi di Aceh adalah sebuah peperangan --- pada hakikatnya, pemberontakan yang terjadi di Aceh adalah suatu "peperangan" antara alat negara sebagai kekuatan yang sah (TNI/POLRI) melawan gerombolan pemberontak. Rakyat Aceh yang mencintai perdamaian tidak pernah terpikir bahwa pemerintah Republik Indonesia di Jakarta akan menggunakan cara-cara klasik, yaitu operasi militer. Sebenarnya banyak cara lain yang dapat digunakan tanpa harus mengorbankan rakyat sipil yang tidak bersalah di Aceh. Perdamaian adalah jalan terbaik yang didambakan oleh semua pihak, termasuk kalangan internasional.

Sementara, menurut Dawi (2002), sosialisasi adalah proses pembelajaran peran, status dan nilai yang harus ada pada seseorang dalam lembaga sosial --- dan merupakan suatu proses pembelajaran yang berkesinambungan sepanjang hayat. Ia mulai dari mengalihkan norma

dan nilai dalam keluarga serta budaya lokal suatu masyarakat kepada anak-anak. Karena, biasanya, apa yang dipelajari ketika anak-anak akan menjadi suatu pendirian atau membentuk konsep diri pada individu tersebut --- yang bila bertambah dewasa, ia akan mempelajari lebih banyak hal dari hasil interaksinya dengan pihak-pihak lain yang disebut sebagai agen-agen sosialisasi. Begitu juga dengan pendidikan yang merupakan salah satu bentuk pengasuhan yang dalam sosiologi lazim disebut sebagai sosialisasi, dapat mengubah tingkah laku awal individu untuk dikoordinasikan dengan kehendak kehidupan sosial masyarakatnya --- dan ragam peranan baru pun akan terus dipelajari dari kecil sampai akhir hayat --- walaupun begitu, sosialisasi bukan merupakan sesuatu yang bersifat revolusioner. Sosialisasi memiliki fungsi yang penting untuk melanjutkan eksistensi sebuah masyarakat, oleh karena itu, semua bentuknya, baik yang diperoleh dari keluarga atau agen-agen lain adalah melibatkan persoalan integrasi ke dalam masyarakat.

Peranan sekolah sebagai agen sosialisasi menjadi semakin penting sejak dimulainya zaman modern. Setidaknya, ada dua alasan utama yang saling terkait dan menjadi penyebab meningkatnya peran sekolah. Pertama; karena kurang partisipasi keluarga dalam mendidik anak-anaknya, kedua; karena struktur ilmu pengetahuan telah berkembang pesat dan sangat kompleks. Dengan begitu, maka, sekolah bisa dianggap sebagai agen ibu dan bapak, yang dapat memberikan pelayanan yang tidak mampu diberi-

kan oleh keduanya --- sehingga, ibu dan bapak merupakan pelanggan dan pengguna yang memiliki harapan besar terhadap sekolah. Seiring dengan itu, sekolah juga merupakan agen bagi murid untuk mengembangkan bakat dan minat mereka --- sementara, para guru juga merupakan agen dari sosialisasi.

Ibu dan bapak telah meyerahkan anak mereka pada guru yang seharusnya memiliki kebebasan dalam mendidik --- karena, guru juga memiliki peran membentuk sikap individu, maka, sekolah seharusnya menjadi tempat transfer nilai-nilai yang jelas. Jadi, tidak heran jika ada pihak yang mengatakan bahwa sekolah telah menjadi agen sosialisasi yang sangat berkuasa.

Menurut Coser (1976), interaksi sosial adalah suatu proses hubungan dua arah yang melibatkan dua atau lebih individu atau kelompok pada suatu tempat dan waktu tertentu --- melibatkan tindakan saling balas membalas tingkah laku seseorang terhadap individu lain, dan seterusnya saling mempengaruhi satu sama lain. Ia bisa terjadi di dalam atau di luar bangunan, di tepi jalan, di lapangan permainan pada setiap waktu. George Simmel dalam Ting (1979) menjelaskan interaksi di antara manusia adalah asal usul segala kehidupan sosial. Masyarakat terdiri dari berbagai bentuk hubungan dan interaksi di antara individu. Contoh beberapa interaksi adalah konflik, kerjasama, persaingan, pembagian tugas dan hubungan superioritas dan inferioritas. Dalam penelitian ini interaksi mengacu pada reaksi yang melibatkan hubungan

sosial melalui komunikasi antara satu individu dengan individu yang lain atau kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain

Perdamaian bisa dilihat sebagai suatu kondisi dengan semua kaum masyarakat hidup dalam kondisi harmonis, toleransi dan saling memahami, walau ada perbedaan di antara mereka. Perdamaian yang ada dalam sebuah negara dapat dilihat sebagai "negatif atau positif". Perdamaian negatif menurut pendapat Askandar (2006) berarti perdamaian yang dihasilkan dari akibat intimidasi dan penindasan hak dan kebebasan rakyat --- sehingga sering terlihat sebagai satu kondisi "tidak perang", tetapi, bukan berarti tidak ada isu-isu konflik di dalam masyarakat tersebut. Selain itu, keinginan anggota masyarakat untuk mencapai tujuannya dapat "dicegah", karena memperhitungkan bakal timbulnya suatu kekacauan di dalam masyarakat tersebut. Sedang perdamaian positif selalu merujuk pada kondisi yang aman dan damai sehingga hak individu dan kelompok dapat dihormati karena terdapatnya berbagai saluran yang sesuai untuk mengekspresikan pendapat dan pandangan mereka. Selanjutnya, keadilan selalu dipertahankan dan diperjuangkan, berkat adanya mekanisme, peraturan, prosedur, dan strategi untuk mengelola dan menyelesaikan berbagai isu-isu konflik yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Sementara, menurut Jeong (2003), perdamaian positif berpusat pada tidak adanya kekerasan langsung, seperti perang. Pencegahan dan eliminasi penggu-

naan kekerasan membutuhkan pemecahan perbedaan melalui negosiasi atau mediasi ketimbang memilih pemaksaan secara fisik. Dalam situasi konflik, maka, saling ketergantungan secara sosial dan ekonomi dapat meminimalisir cara-cara pemaksaan. Barrash (2001) menyatakan bahwa perdamaian negatif ini berangkat dari pandangan realis yang memandang bahwa perdamaian adalah tidak adanya perang. Perspektif ini memandang bahwa perdamaian ditemukan jika tidak ada perang atau bentuk-bentuk kekerasan langsung yang terorganisir. Konsep perdamaian negatif ini kemudian berkembang dalam konsep pembangunan perdamaian negatif seperti diplomasi, negosiasi, dan resolusi konflik. Konsep perdamaian positif (*positive peace*), berdasarkan pada pemahaman dasar dari kondisi-kondisi sosial, cara menghapus kekerasan struktural sehingga tidak ada lagi kekerasan secara langsung. Pengertian terhadap perdamaian ini mempengaruhi strategi perdamaian yang sedang aktif, yaitu dengan mengadakan usaha perubahan diskriminasi struktural. Tuntutan persamaan dalam mendapatkan perlakuan oleh sistem yang ada, baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial merupakan strategi tindakan perdamaian positif.

C. Interaksi Antara Pelajar Dengan Pelajar Era Perang dan Damai

Pada era perang kehidupan siswa-siswa di Aceh dipengaruhi oleh lingkungan yang konflik sehingga telah memberikan implikasi negatif terhadap siswa dalam berinteraksi terhadap sesamanya.

Misalnya; sering terjadi perkelahian antar pelajar di sekolah karena perbedaan sikap politik atau karena egoisme masing-masing. Yang jelas dalam menyelesaikan masalah sehari-hari para siswa di sekolah telah memilih cara-cara kekerasan sebagai pilihan utamanya (wawancara dengan Drs. Salahuddin, guru, 30 Juli 2010).

Ketika pemerintah pusat (Jakarta) menerapkan darurat sipil dan darurat militer di Aceh, maka, hampir semua daerah terlibat dalam konflik bersenjata --- karena pelajar berasal dari masyarakat --- akibatnya, proses belajar mengajar terhadap para pelajar pun terkontaminasi oleh kondisi konflik di daerahnya masing-masing. Sikap semua pihak yang berkonflik memberikan dampak langsung dalam interaksi antara siswa dengan siswa bahkan terbawa sampai ke dalam proses belajar mengajar di sekolah. Namun ketika kondisi Aceh memasuki zaman damai, maka, kondisi pendidikan di Aceh mulai normal kembali (wawancara dengan Drs. Jafaryus, guru, 21 Juli 2010).

Perang yang berlangsung lama di Aceh menyebabkan interaksi antara siswa dengan siswa berjalan tidak sebagaimana mestinya. Pelajar di sekolah terbagi dalam kelompok-kelompok menurut daerah asal mereka. Misalnya; di sekolah, siswa yang berasal dari A dan daerah B akan membentuk kelompok masing-masing --- hal ini akibat dari perbedaan pengertian dan ajaran dari masing-masing wilayah mereka terbawa sampai ke sekolah. Jika dilihat secara umum, hal ini tidak nampak ke permukaan bahkan seakan tidak ada persoalan, padahal sesungguhnya, mereka

terkotak-kotak. Ketika Aceh telah aman dan GAM telah dibubarkan kelompok-kelompok tadi pun hilang dengan sendirinya (Wawancara dengan Alfian, S. Pd, guru, 19 Juli 2010).

Perang yang terjadi di Aceh juga mengakibatkan terganggunya hubungan sosial di dalam lembaga pendidikan. Anak-anak Aceh berubah menjadi keras dan susah beradaptasi dengan lingkungan sosial, mereka tidak pandai mengendalikan emosi, sangat labil, dan mudah tersinggung, bahkan sering berkelahi dengan sesama teman di sekolah (Wawancara dengan Dra. Ratna, guru, 20 Juli 2010). Peperangan yang terjadi antara tentara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah memberikan efek langsung pada siswa-siswa yang tinggal di sana. Bahkan, sejumlah siswa terlibat sebagai mata-mata ketika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih berperang dengan pemerintah Indonesia. Hal ini terungkap dari wawancara dengan salah seorang informan yang merupakan mantan tentara GAM wilayah Aceh Timur, yang kini telah kembali ke masyarakat (Wawancara dengan informan berinisial BBH, 22 Februari 2011). Ia menambahkan keterlibatan siswa sebagai intelijen GAM dilakukan karena mereka dapat bergerak bebas karena memiliki seragam sekolah dan kartu pelajar sehingga dapat bebas pada setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh TNI/POLRI. Keterlibatan pelajar sebagai mata-mata GAM, tentunya setelah melewati berbagai seleksi yang demikian ketat, diharapkan, dapat memberikan informasi lebih banyak dan akurat tentang

segala aktivitas yang tengah atau bakal dilakukan oleh TNI/POLRI.

Mirzatul Fuadi, Pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) menyebutkan, pada era perang, sebetulnya banyak pelajar di sekolah yang beraliran GAM bahkan bisa dikatakan mayoritas, namun, di sekolah mereka tidak pernah berbuat macam-macam --- jika ada kegiatan-kegiatan yang bernuansakan politik, selalu dilaksanakan dengan diam-diam atau di luar jam sekolah. Sementara orang tua siswa berpendapat lain, pada masa perang, anak-anak lebih patuh dan mudah diatur. Sehabis jam belajar, mereka langsung pulang ke rumah. Tetapi, setelah kondisi Aceh aman, sepertinya, tidak tertutup kemungkinan setelah jam sekolah mereka tidak langsung pulang ke rumah (Wawancara dengan Tajul Badri, orang tua siswa, 20 Juli 2010).

Tak ada yang bisa memungkiri, perang telah membawa dampak yang sangat dilematis bagi para pelajar, misalnya; karena mengikuti upacara dan menghormati bendera merah putih, maka, mereka dianggap oleh GAM sebagai pendukung Indonesia, padahal, sesungguhnya, mereka hanya mengikuti aturan yang diberlakukan oleh sekolah. Tak cukup sampai di situ, hampir semua pelajar tidak berani terlalu aktif di sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler atau mengambil belajar tambahan, sehingga sangat merugikan bahkan berakibat pada menurunnya kreativitas siswa (Wawancara dengan Maulidin, Siswa, Juli 2010).

Karena pelajar merupakan anak yang secara emosional masih labil, maka,

ia sangat membutuhkan bimbingan dari para guru dan juga orang tuanya. Jika ada sikapnya yang kurang baik di sekolah, itu adalah tanggung jawab para guru ---dengan cara memberikan teguran dan bimbingan, sementara, di rumah, segala sesuatunya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Tetapi, sedikit banyak, perang telah membawa pengaruh buruk pada sikap dan kehidupan pelajar di Aceh (Wawancara dengan Nuraini, orang tua siswa, 5 Agustus 2010).

Pada era perang, karena pada saat itu tidak ada tempat untuk santai, maka, para siswa pun lebih rajin ke sekolah --- tiap hari, kecuali libur, kami hanya sekolah - rumah atau sebaliknya. Walau tiap hari berangkat ke sekolah, tetapi, jika ada kontak tembak, kami pun langsung pulang. Kondisi konflik membuat kehidupan sangat tertekan, walau begitu, interaksi antar siswa lebih terkendali. Syukur ... sekarang kondisi Aceh dalam keadaan damai, sehingga proses belajar mengajar pun sudah dapat berjalan dengan baik, diharapkan, prestasi belajar pun akan kian meningkat (Wawancara dengan Sakdan, mahasiswa, 9 November 2010).

Setelah penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka, interaksi antar siswa pun sedikit demi sedikit mulai berubah. Cara - cara kekerasan (*violent*) seperti yang pernah terjadi pada masa perang dulu mulai hilang. Sebagaimana yang ungkapkan oleh Drs. Jafaryus; "Pada era damai, sikap para siswa secara berangsur angsur berubah seiring dengan menurunnya oto-

ritas kedua belah pihak yang berkonflik, sehingga berpengaruh dalam proses kegiatan belajar mengajar (wawancara dengan Drs. Jafaryus, guru MAN Idi, 21 Juli 2010).

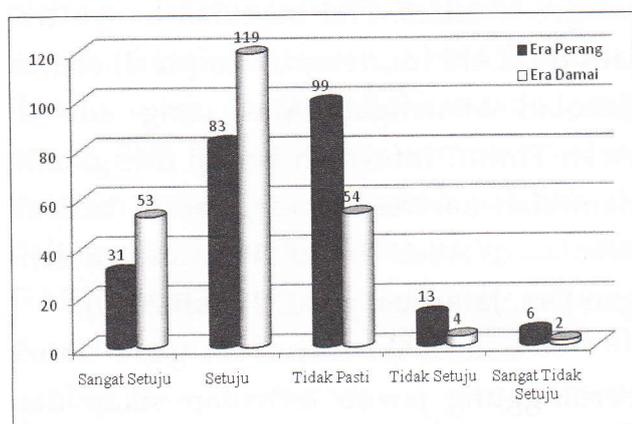
Informan lain menyebutkan, pada masa awal rekonsiliasi, pihak GAM masih mempraktikkan sikap yang sering dilakukan di era perang. Misalnya, menitipkan anaknya untuk sekolah di sekolah-sekolah tertentu, meski, secara administrasi bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan pada era damai di MAN Idi Rayeuk, Aceh Timur, panglima GAM datang untuk menitipkan anaknya untuk sekolah tanpa pihak sekolah bisa menolaknya (wawancara dengan Dra. Salwa, 19 Juli 2010).

Situasi damai telah mengubah interaksi antar siswa menuju kearah yang lebih positif. Sikap pada era perang yang agak kasar pun berubah. Sekarang, keinginan siswa untuk belajar dengan layak pun sudah terwujud --- kondisi yang kondusif pun amat mendukung untuk melakukan proses belajar mengajar. Secara umum dapat dikatakan, berbagai kebiasaan buruk siswa semasa konflik teralah berubah, walau, perdamaian baru berjalan lima tahun (wawancara dengan Rahmatillah, siswa MAN Idi, 20 Juli 2010).

Sementara, Ainul Ridha berpendapat; sekarang, siswa semakin kompak, sehingga berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dapat berjalan sebagaimana mestinya karena para siswa telah bersatu --- di antaranya adalah melaksanakan perayaan Maulidur Rasul, kegiatan bulan

Ramadhan atau kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Perilaku mereka pun banyak berubah, bahkan, kini, tidak ada lagi permasalahan antar siswa di sekolah (wawancara dengan Ainul Ridha, siswa MAN Idi, 20 Juli 2010). Untuk lebih jelas tentang interaksi antar siswa di era perang dan damai dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1: Interaksi pelajar dengan pelajar pada era perang dan damai



N= 232

Sumber: Kerja lapangan, 2011

Data kajian menampakkan; pada era perang 31 orang (13.4%) responden menyatakan sangat setuju hubungan antar pelajar semakin baik, 83 orang (35.8%) responden menyatakan setuju, 99 orang (42.7%) responden menyatakan tidak pasti, 13 orang (5.6%) responden menyatakan tidak setuju dan 6 orang (2.6%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Sedang pada era damai; 53 orang (22.8%) responden sangat setuju dengan pernyataan hubungan antar pelajar semakin baik, 119 orang (51,3%) responden menyatakan setuju (terjadi peningkatan 15.5%), 54 orang (23,3%)

responden menyatakan tidak pasti, 4 orang (1.7%) responden menyatakan tidak setuju dan 2 orang (0.9%) responden menyatakan sangat tidak setuju jika dikatakan hubungan pelajar dengan pelajar semakin baik. Semakin meningkatnya jumlah responden yang memberikan jawaban setuju dengan pernyataan di atas, maka, dapat dikatakan bahwa interaksi antar pelajar pada era damai semakin membaik.

D. Interaksi Antara Pelajar Dengan Guru Era Perang dan Damai

Proses belajar mengajar merupakan bagian kegiatan interaksi antara dua manusia; yaitu siswa yang belajar dan guru yang mengajar --- dan siswa sebagai subjek pokoknya. Interaksi antara siswa dengan guru merupakan syarat utama dalam berlangsungnya proses sosialisasi di sekolah. Walau tugas mengajar memiliki tanggung jawab moral yang sangat berat, karena, berhasil atau tidaknya pendidikan sangat tergantung pada kemampuan guru di dalam melaksanakan tugasnya, tetapi, kondisi daerah yang sangat mencekam di saat perang menyebabkan para guru tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Pada era perang, interaksi antara siswa dengan guru terjalin tidak baik, akibat perilaku para siswanya. Penghargaan mereka terhadap guru amat kurang, sehingga ada jargon-jargon yang menyatakan; guru adalah pengabdian untuk Jawa, guru adalah pengabdian untuk Jakarta, guru adalah pengabdian untuk NKRI dan lain sebagainya. Hal tersebut karena ada

doktrin dari pihak GAM kepada masyarakat di desa-desa bahwa tidak perlu sekolah karena guru adalah pegawai pemerintah yang mengabdikan untuk kepentingan Jakarta. Kalau sudah merdeka, walau tanpa sekolah dan bekerja, masyarakat akan tetap memperoleh gaji dari pemerintah yang sedang diperjuangkan oleh GAM (Wawancara dengan Dra. Salwa, guru, 19 Juli 2010).

Inilah doktrin yang ditanamkan oleh GAM kepada masyarakat, sehingga membuat paradigma dan sikap mahasiswa terhadap guru dan dunia pendidikan jadi berubah. Bahkan, informan yang tersebut di atas juga menceritakan pernah mengalami intimidasi dan pemerasan secara langsung oleh pihak GAM pada masa perang. GAM juga pernah datang ke sekolah dengan membawa BOM dan meletakkannya di meja guru gara-gara ada siswa MAN Idi dicurigai terlibat dalam pencurian motor milik GAM di Idi Cut, dan pelajar tersebut tercatat sebagai siswa Kelas III/IPS, di MAN Idi, yang waktu itu wali kelasnya adalah saya (kata Salwa).

Menurut Informan, sebenarnya, peristiwa tersebut terjadi di luar jam sekolah, namun GAM tetap menyalahkan guru karena tidak bertanggung jawab di dalam mendidik sehingga ada siswanya yang melakukan pencurian. Bahkan GAM mengeluarkan kata-kata kasar yang sampai hari ini masih diingat oleh informan. GAM tidak sadar, bahwa tugas mendidik anak bangsa bukan hanya tugas guru semata-mata, tetapi juga merupakan tugas keluarga dan masyarakat. Guru tetap akan disalahkan jika ada perilaku siswan-

ya yang tidak baik, tetapi, ia akan dipuji jika ada siswanya mendapat nilai yang cemerlang dan menjadi juara. Ini benar-benar tidak adil.

Dominannya otoritas kedua belah pihak yang berkonflik, membuat guru takut pada siswanya sendiri --- sehingga interaksi di antara keduanya pun tidak berjalan secara sehat. Bahkan ada pelajar yang berani mengancam gurunya di sekolah dengan peluru AK 47, akibat teror yang seperti itu, guru pun menjadi takut dan sangat tertekan. Hal ini tidak hanya terjadi di MAN Idi, tetapi, hampir di semua Sekolah Menengah Atas yang ada di Aceh Timur. Informan berani mengklaim demikian karena ia mengajar di banyak sekolah di Aceh Timur (Wawancara dengan Drs. Jafaryus, guru, 21 Juli 2010).

Ketika GAM menuntut guru untuk bertanggung jawab terhadap sikap dan perilaku siswanya, sebenarnya ada satu hal yang harus diingat --- waktu itu, siswa datang ke sekolah hanya untuk mencari status dan mendapatkan kartu pelajar, bukan untuk belajar. Status pelajar menyelamatkan mereka dari pemeriksaan aparat keamanan Indonesia. Oleh karena itu, ketika itu, meski motivasi belajarnya sama sekali tidak ada, tetapi, banyak pemuda kampung walau kondisinya sudah sangat terjepit datang ke sekolah untuk mendaftar sebagai siswa. Kondisi perang juga membuat guru harus berhati-hati dalam memberikan nilai dan menentukan kelulusan siswa. Kenaikan kelas atau kelulusan pelajar yang cemerlang dan tidak cemerlang terpaksa harus disetujui demi menyelamatkan jiwa, bukan untuk me-

nyelamatkan dunia pendidikan. Karena pada masa perang yang memegang aturan adalah kekuasaan. Dalam konflik di Aceh, pelajar yang mendapat nilai rendah atau tidak naik kelas akan melaporkan keadaannya kepada pihak yang punya kekuasaan; misalnya GAM atau TNI (Wawancara dengan Dra. Ratna, guru, 20 Juli 2010).

Bottom of Form

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Drs. Jafaryus; sudah menjadi rahasia umum, kelulusan Ujian Akhir Nasional (UAN) tidak objektif. Bahkan ada yang hanya 25% hadir, tetapi semuanya dinyatakan lulus, karena pihak sekolah tidak mau mengambil risiko baik terhadap GAM maupun dengan *steikholder* lainnya --- sehingga, ada guru yang menjawab lembar jawaban siswanya --- dan ini menjadi problematik yang besar dalam dunia pendidikan kita di Aceh. Yang lebih memilukan lagi adalah, ada siswa yang sudah 2 (dua) tahun tidak aktif ke sekolah karena berjuang bersama GAM, tetapi, ketika tiba-tiba mereka berkeinginan untuk kembali ke sekolah, guru tidak kuasa untuk menolaknya. Walau secara administratif salah, tetapi, guru harus menuruti keinginan mereka. Padahal, sejujurnya, mereka ke sekolah hanya mengungsi untuk mencari tempat yang aman. Dominasi kedua belah pihak yang bertikai (GAM dan TNI / Polri) telah membuat maruah dan wibawa guru menjadi benar-benar tercoreng (Wawancara dengan Drs. Jafaryus, guru, 21 Juli 2010).

Selama bertahun-tahun, meskipun be-

rat, namun itulah kenyataan yang harus diterima, kondisi tersebut di atas harus dilalui oleh para guru di MAN Idi Rayeuk, Aceh Timur. Sebab jika mereka bertahan pada kodratnya dan berprinsip sebagai prinsip Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka, jiwanya akan dihabisi oleh pihak yang tidak senang dengan Indonesia. Oleh sebab itu, para guru harus dapat beradaptasi dengan kondisi pada saat itu, bahkan, jika perlu, mereka pun harus rela mengangkat isu yang dapat menyelamatkan kinerjanya. Misalnya; mengangkat isu munculnya disintegrasi dalam bentuk pergolakan karena adanya ketidakadilan antara Jakarta terhadap Aceh. Kalau isu itu yang mereka angkat, maka, para guru dianggap berada dipihak mereka (GAM) sehingga aman dalam menjalankan tugasnya (Wawancara dengan Drs. Jafaryus, 21 Juli 2010).

Alfian, S. Pd, guru Bahasa Indonesia yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun di MAN Idi Rayeuk, mengakui bahwa interaksi antara siswa dengan guru pada era perang berjalan secara tertutup --- siswa tidak berani berinteraksi secara terbuka dengan gurunya --- dan guru pun ragu-ragu untuk menanyakan hal yang bersifat lebih pribadi kepada para siswanya. Jarak antara siswa dengan guru pun langsung tercipta secara tidak sengaja (Wawancara dengan Alfian, S. Pd, 19 Juli 2010). Alfian menambahkan, pada masa perang, siswa berani secara terbuka meminta guru untuk berhenti bekerja atau pindah tugas. Ini pernah dilakukan oleh siswa kelas III

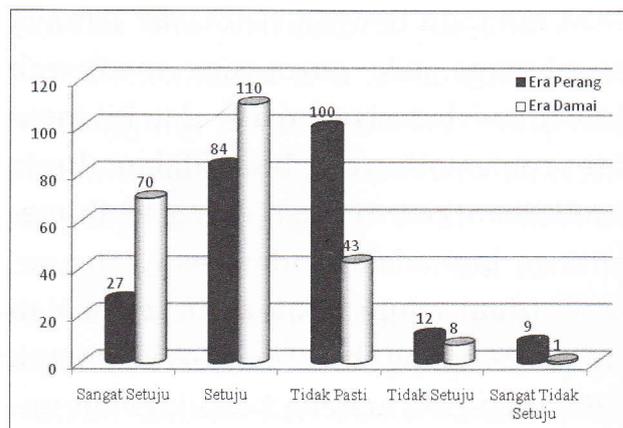
(tahun akhir), pada rentang 2003, di MAN Idi Rayeuk, Aceh Timur. Mereka meminta guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia agar berhenti mengajar mata pelajaran tersebut, karena menurut mereka, Bahasa Indonesia adalah bahasa penjajah yang selama ini telah banyak mengorbankan nyawa keluarga mereka.

Perang ini telah membuat banyak siswa tidak patuh pada peraturan. Jika ditegur, mereka pun tidak memperdulikannya. Ketika itu, peraturan memang tidak dapat ditegakkan. Melihat kondisi siswa yang semakin hari semakin tidak terkendali, maka, pada era perang, pemerintah setempat menempatkan satu regu TNI /POLRI di sekolah-sekolah yang dianggap berbahaya --- tujuannya tak lain, agar peraturan kembali dapat ditegakkan. Menurut otoritas setempat, penempatan tentara akan membawa hasil positif untuk pihak sekolah (Wawancara dengan Tantawi, perwakilan KORAMIL Darul Ihsan, Aceh Timur, 4 Maret 2011).

Tantawi mengakui, ketika itu, interaksi antara siswa dengan guru memang kurang baik. Boleh dikata, pada waktu konflik, apalagi di luar jam sekolah, para pelajar sering bersikap kurang santun. Dalam pandangannya, hal tersebut terjadi karena adanya ruang dalam pembagian tugas. Tugas guru hanya di sekolah, sedang di luar jam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua. Akibatnya, siswa menjadi kurang hormat pada guru bukan hanya waktu sekolah saja --- bahkan, di luar jam sekolah, mereka juga tidak respek terhadap gurunya. Informan ini juga menambahkan, seiring dengan berjalan-

nya waktu, maka, interaksi antara siswa dengan guru pun mulai mengalami perubahan. Saat ini, ketika perdamaian Aceh sudah berjalan lebih dari lima tahun, interaksi antara guru dengan siswa pun makin baik, hal ini dibuktikan dengan para siswa yang sudah berani mencurahkan segala permasalahannya kepada gurunya. Bahkan ada yang menemui guru di kantornya untuk menanyakan berbagai hal yang tidak sempat ditanyakan di dalam ruang belajar. Data penelitian menunjukkan, sekarang, interaksi siswa dengan guru menjadi semakin baik, sebagaimana yang terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2: Interaksi pelajar dengan guru pada era perang dan pada era damai



N= 232

Sumber: Kerja lapangan, 2011

Data di atas menunjukkan bahwa ada 27 orang (11.6%) responden yang menyatakan sangat setuju bahwa pada era perang interaksi antara pelajar dengan guru semakin baik, 84 orang (36.2%) responden menyatakan setuju, 100 orang (43,1 %) responden menyatakan tidak pasti, 12 (5.2%) responden menyatakan

tidak setuju dan 9 orang (3.9%) responden menyatakan sangat tidak setuju.

Sedangkan pada era damai, interaksi antara pelajar dengan guru menjadi semakin baik. Hal ini terlihat dari jawaban 70 orang (30,2%) responden menyatakan sangat setuju dikatakan bahwa hubungan pelajar dengan guru menjadi semakin baik (mengalami peningkatan ke arah positif 11.6 peratus), 110 orang (47.4%) responden menyatakan setuju (mengalami peningkatan ke arah positif 11.2 peratus), 43 orang (18.5%) responden menyatakan tidak pasti, 8 orang (3.4%) responden mengatakan tidak setuju dan 1 orang (0.4%) responden menyatakan sangat tidak setuju.

Agussalim berpendapat interaksi antar pelajar, dan antar pelajar dengan guru di Aceh sekarang sama dengan daerah lain di Indonesia. Interaksinya sudah baik. Ia berpendapat, ketika masa konflik, meski jarang bertemu, di Aceh, antar guru terasa lebih bersatu. Guru akan tetap datang ke sekolah jika ada jam mengajar serta tak pernah mengalami masalah dalam perjalanan dari rumah ke sekolah. Selain itu, ketika itu, kondisi guru sama-sama terhimpit oleh situasi, boleh dikata, guru dicurigai oleh GAM maupun TNI/POLRI (wawancara dengan Agussalim, kepala dinas pendidikan Aceh Timur, 16 Maret 2011).

Dengan adanya perdamaian, kini, sekolah-sekolah di Aceh telah dapat menerapkan aturan dengan tegas, sehingga guru sudah dapat kembali memainkan perannya di sekolah. Misalnya; jika ada siswa yang memang tidak layak untuk

naik kelas meski telah mengikuti remedial dan nilai akhirnya tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka, ia tidak akan naik kelas. Dan sekarang, para siswa pun sudah dapat menerima kenyataan tersebut (wawancara dengan Fadlisyah, S. Ag, guru MAN Idi, 22 Juli 2010).

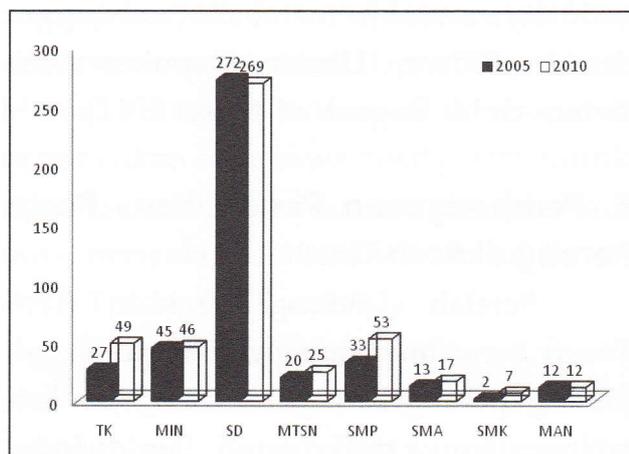
Ridwan Usman menyebutkan, Polisi, sebagai alat negara terus memberikan rasa aman kepada para guru dan siswa di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Menurutnya; hubungan antara guru dengan siswa baik pada masa perang atau era damai harus selalu berjalan dengan baik, sebab jika tidak, akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Dan sekarang hubungan di antara keduanya semakin membaik (wawancara dengan Ridwan Usman, Kapolres Aceh Timur, di Idi Rayeuk, 4 Maret 2011).

E. Pembangunan Pendidikan Pasca Perang di Aceh Timur

Setelah perang berakhir, Aceh Timur terus memacu pembangunan di bidang pendidikan guna mengejar ketertinggalannya dari daerah lain di Indonesia. Saat ini, kendala utama yang dihadapi adalah minimnya ketersediaan ruang kelas yang mampu menampung jumlah siswa secara proporsional, keterbatasan jumlah tenaga pengajar, dan lokasi penempatan sekolah yang belum terkonsentrasi secara merata dengan memperhatikan rasio jumlah siswa maupun jarak jangkauan siswa terhadap sekolah (Profil Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, 2010).

Jika dibandingkan pada rentang 2005 dengan 2010, prasarana pendidikan di Aceh Timur telah mengalami jumlah peningkatan yang sangat mengembirakan --- yang menurun hanya jumlah Sekolah Dasar --- yang pada era perang, karena sekolahnya dibakar, maka, mereka disatukan dengan sekolah yang lain. Pada 2005 jumlah Sekolah Dasar (SD) ada 272 buah, sedangkan pada 2010 berjumlah 269 buah. Sedang untuk peringkat sekolah yang lain terus mengalami penambahan jumlah. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3: Perbandingan Jumlah sekolah tahun 2005 dan tahun 2010



Sumber: Diolah dari profil pendidikan Kabupaten Aceh Timur tahun 2005 dan 2010

Menurut Faisal Hasan, gedung-gedung sekolah yang berada di bawah Departemen Agama (DEPAG Aceh Timur) yang dibakar pada masa konflik, semuanya sudah dibangun kembali oleh pemerintah. Hal ini terlaksana berkat kerja sama dari semua pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, pihak sekolah

serta pihak keamanan (wawancara dengan Drs. Faisal Hasan, Kepala Departemen Agama Republik Indonesia, Kantor wilayah Aceh Timur, 17 Maret 2011). Demikian juga dengan gedung sekolah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), semuanya telah dibangun kembali. Bahkan, ketika memasuki era perdamaian, pemerintah banyak membangun gedung-gedung sekolah yang baru (wawancara dengan Agussalim, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Timur, 16 Maret 2011).

F. Kesimpulan

Dari Pembahasan di atas didapat simpulan bahwa perang yang terjadi di Aceh juga telah mengakibatkan terganggunya interaksi sosial dalam lembaga pendidikan. Anak-anak Aceh sudah menjadi keras dan sulit beradaptasi dengan lingkungan sosial, tidak pandai mengendalikan emosi, sangat labil dan mereka menjadi mudah tersinggung, bahkan sering bertengkar dengan sesama teman di sekolah. Pada era perang interaksi antara siswa dengan guru juga terjalin dengan tidak harmonis, bahkan penghargaan mereka terhadap guru sangat kurang sekali. Hal tersebut terjadi karena adanya doktrin dari pihak GAM kepada masyarakat di desa-desa bahwa sekolah tidak penting. Dominannya otoritas kedua belah pihak yang berkonflik, telah membuat guru takut kepada siswanya sendiri, sehingga interaksi antara guru dengan siswa dan interaksi antar guru dengan orang tua siswa terjalin secara kurang sehat.

Keamanan yang tercipta pada era

damai di Aceh telah membuka ruang gerak masyarakat menjadi bebas. Kebebasan yang diperoleh dari perdamaian telah memberikan kontribusi yang positif dalam merubah interaksi sosial di kalangan pelajar di Aceh ke arah yang lebih positif. Pendidikan di Aceh mulai bangkit, pembangunan di bidang pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah prasarana pendidikan di Aceh Timur pada 2010. Demi mewujudkan perdamaian yang hakiki, maka, lembaga-lembaga sosial harus lebih memainkan perannya dalam menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat, serta membentuk kondisi sehingga masyarakat berada dalam situasi yang tertib, tidak ada perang sampai segala fungsi dan tugas dapat dilaksanakan dengan baik

Daftar Pustaka:

- Askandar, Kamarulzaman. 2006. *Budaya Perdamaian Budaya Kita*. Penang: REPUSM dan SEACSN.
- Akresh, Richard, de Walque, Damien. 2008. Armed Conflict and Schooling: Evidence from the 1994 Rwanda Genocide. In *IZA Discussion Paper*.
- Akresh, Richard, Bundervolt, Tom, Verwimp, Phillip. 2009. Health and Civil War in Rural Burundi. *Journal of Human Resources* 44 (2).
- Baharum, Daud. 1982. *Perang Dunia Kedua dan Asia*. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara.
- Barrash, David, P., dan Webel, Charles, P. 2001. *Peace and Conflict Studies*. California USA: Sage Publication.
- Bellows, John, Miguel, Edward. 2008. *War and Local Collective, Jeannie Action in Sierra Leone*: UC Berkeley.
- Chaidar, Al. 1998. *Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*. Jakarta: Pustaka Alkausar.
- Coser, L.A. 1976. *Sociological Theory: A Reading*. New York: McMillian Pub. Co.
- Dawi, Amir Hasan. 2002. *Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan*. Vol. Ed. ke-2. Tanjong Malim: Quantum Books.
- Dinas pendidikan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003. Laporan Tahunan.
- Dube, Oeindrila, Vargas, Juan F. 2006. Are All Resources Cursed? Coffee, Oil and Armed Conflict in Colombia. Weatherhead Center for International Affairs. In *Working Paper*: Harvard University.
- Goldson, Edward. 1996. The Effect Of War On Children. *Child Abuse & Neglect* 20 (9):809-819.
- Ichino, Andrea, Winter-Ebmer, Rudolf. 2004. The long-run educational cost of World War II. *Journal of Labor Economics* 22 (1):57-86.
- Jeong, Ho-Won. 2003. *Peace and Conflict Studies: An Introduction*. England: Ashgate Publishing Company.
- Kreso, Adila Pasalic. 2008. The War and Post-War Impact On Education System Of Bosnia and Herzegovina *International Review of Education* 54 (Springer):353-374.
- Linge, Luth Ari. 1993. *Malapetaka di Bumi*

- Sumatera. Medan: PT. Kemala Sari Interprice.
- Merrouche, Ouarda. 2006. The human capital cost of landmine contamination in Cambodia. In *HiCN Working Paper*
- Nelles, Wayne. 2005. Education, Underdevelopment, Unnecessarywar and Human Security In Kosovo. *International Journal Of Education Development* 25:69-84.
- Robin, Hingham. 1972. *Civil Wars In The Twentieth Century* New York: University Press Of Kentucky.
- Stewart Frances, Cindy Huang, and Michael Wang. 2001. *Internal wars in developing countries: an empirical overview of economic and social consequences* Edited by V. Fitzgerald, *War and underdevelopment*. New York: Oxford University Press.
- Ting, Chew Peh. 1979. *Konsep Asas Sosiologi*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Warija, Chamil. 1989. *Pergolakan Antara Bangsa, Perkembangan dan Isu Utama Sejak 1945*. Kuala Lumpur: AMK Interaksi Sdn. Bhd.